



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2026



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2026**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

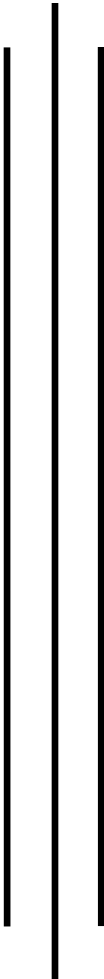
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXXIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.



Batam, 24 Agustus 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

Imam Tohari, S.H, M.H
NIP. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.....	 6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDAAN PD	 26
 BAB IV PENUTUP	 44
4.1 Catatan Penting	44
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	44
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II.....	19
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II....	20
Tabel 2.4	Pencapaian indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II	21
Tabel 2.5	Permasalahan Daerah dan Isu Strategis	21
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. Penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025-2029 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (Lembaran

- Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381).
 20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 85 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1655);
 21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614).
 22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 161)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- * Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak tercapai target karena rekening Sewa Sound System Dalam rangka efisiensi anggaran pada kegiatan peringatan HUT Satpol PP, pengadaan sound system yang semula direncanakan melalui pihak ketiga tidak dilaksanakan. Sebagai alternatif, kebutuhan sound system dipenuhi melalui peminjaman dari Bagian Umum Setdako Batam.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak tercapai targetnya karena adanya efisiensi
- * Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah tidak bisa dilaksanakan karena kebijakan pemerintah pusat saat ini hanya memprioritaskan pembentukan PPNS bagi kepala satuan kerja dan jumlah personel PPNSnya disatuan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang. Maka dengan itu kami Satpol PP Kota Batam tidak masuk dalam prioritas pembentukan PPNS Tahun ini.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- * Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
 - Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
- Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
 - Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dengan capaian kinerja yang masih berada dalam batas target yang telah direncanakan.

Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat program/kegiatan yang memerlukan penyesuaian atau perubahan target akibat adanya realisasi yang melampaui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	05					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	74,70	0	0%
							Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	89	0	0%
1	05	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	60%	60%
1	05	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
1	05	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2 Laporan	66,66
1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	598 Orang /Bulan	587 Orang / Bulan	98,16%
1	05	01	2	02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
1	05	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	100%	0%	0%
1	05	01	2	03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0%
1	05	01	2	05		Keiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	3,82%	2,29%	59,94
1	05	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	5 Orang	3 Orang	60%
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	63,16%	63,16
1	05	01	2	06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2	06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	85,71%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	01	2	06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	66,66%
1	05	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
1	05	01	2	06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	94,02%	94,02%
1	05	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	46 Unit	40 Unit	86,95%
1	05	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	100%
1	05	01	2	07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50%	50%
1	05	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	55,22%	55,22%
1	05	01	2	09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%
1	05	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	26 Unit	50,98%
1	05	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0 Unit	0%
1	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100%	100%	100%
							Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang telah	23,41%	22,15%	94,61%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
							mengikuti Diklar Dasar			
							Persentase Perda Perkada yang di tegakan	100%	100%	100%
							Persentase Penyelenggaraan Satlinmas	31,82%	0%	0%
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	100%	100%	100%
							Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	31,82%	0%	0%
							Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	23,41%	22,15%	94,61%
							Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	1,64%	1,64%
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	0%	0%
1	05	02	2	01	0003	Sub Kegiatan Koordiasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tingkat	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman	5 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Kabupaten/Kota	dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota			
1	05	02	2	01	0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	8 Dokumen	1 Dokumen	12,5%
1	05	02	2	01	0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1	05	02	2	01	0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah aparatatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	35 Orang	18 Orang	51,42%
1	05	02	2	01	0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	0 Orang	0%
1	05	02	2	01	0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	02	2	01	0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
1	05	02	2	01	0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	0 Laporan	0%
1	05	02	2	01	0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	615 Unit	10 Unit	1,63%
1	05	02	2	01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	100%	33,33%	33,33%
1	05	02	2	02	0005	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
1	05	02	2	02	0006	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	11 Unit	5 Unit	45,45%
1	05	02	2	02	0007	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	0 Laporan	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	02	2	02	0008	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	6 Laporan	0 Laporan	0%
1	05	02	2	02	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	02	2	02	0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	02	2	02	0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	7,14%	5,81%	81,37%
1	05	02	2	03	0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
1	05	02	2	03	0004	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 Laporan	0 Laporan	0%
1	05	02	2	03	0005	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	8 Laporan	66,66%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	02	2	03	0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapsitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	0 Laporan	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja, yaitu Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), serta Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM).

Pada indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan, target kinerja Renstra Tahun 2026 ditetapkan sebesar 60,48 indeks. Sampai dengan Triwulan II, realisasi/proyeksi capaian belum dapat disajikan atau masih sebesar 0, karena pengukuran indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan belum dilaksanakan. Pengumpulan data dan survei kepuasan direncanakan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator ini pada Triwulan II belum mencerminkan hasil akhir kinerja Tahun 2026.

Selanjutnya, pada indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), target kinerja Renstra Tahun 2026 ditetapkan sebesar 84,34 persen. Sampai dengan Triwulan II, realisasi/proyeksi capaian masih tercatat 0 persen. Kondisi tersebut bukan menunjukkan tidak adanya pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi disebabkan indikator IPKKU belum dapat diukur pada Triwulan II, karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan pendukung serta pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan pengukuran indikator. Pengukuran capaian indikator akan dilakukan setelah data pendukung tersedia dan proses pengumpulan data selesai.

Pada indikator Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM), target kinerja Renstra Tahun 2026 ditetapkan sebesar 36,62 persen. Sampai dengan Triwulan II, realisasi/proyeksi capaian juga masih sebesar 0 persen. Hal tersebut disebabkan indikator IPM belum dapat dilakukan pengukuran pada Triwulan II, mengingat kegiatan pendukung dan pengumpulan data masih dalam proses pelaksanaan. Pengukuran indikator akan dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan tersedia dan dapat diverifikasi.

Secara keseluruhan, realisasi ketiga indikator sasaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih tercatat 0, namun kondisi tersebut lebih disebabkan oleh waktu pengukuran indikator dan proses pengumpulan data yang belum selesai, bukan semata-mata karena tidak tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa indikator memang direncanakan untuk diukur pada Semester II setelah seluruh kegiatan pendukung selesai dilaksanakan.

Dalam rangka Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pada Semester II dapat mendukung pencapaian target indikator yang telah ditetapkan. Perangkat Daerah akan melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pendukung, pengumpulan dan validasi data, serta pengukuran indikator secara tepat waktu sehingga capaian kinerja akhir Tahun 2026 dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara lebih objektif dan akuntabel.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks	60.48	Indeks	0	Pengukuran Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan belum dilaksanakan pada Triwulan II. Pengumpulan data dan survei kepuasan akan dilaksanakan pada Triwulan IV sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	Persentase	84.34	Persentase	0	Capaian Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) belum dapat diukur pada Triwulan II karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan pendukung dan pengumpulan data indikator.
3.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	Persentase	36.62	Persentase	0	Capaian Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) belum dapat diukur pada Triwulan II karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan pendukung dan pengumpulan data indikator.

Tabel 2.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Kinerja Kunci PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase	100	Persentase	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	Persentase	0	bahwa sampai dengan periode pelaporan belum terdapat capaian yang dapat dihitung terhadap indikator
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	14	Orang	10	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	Persentase	0	bahwa sampai dengan Triwulan II belum terdapat SOP yang dapat diperhitungkan sebagai capaian indikator
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase	100	Persentase	0	pemenuhan atau penggunaan sarana prasarana minimal yang menjadi dasar pengukuran indikator belum menghasilkan capaian yang dapat diperhitungkan sampai dengan periode pelaporan
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (2024: hanya PNS, tahun selanjutnya seluruh ASN)	Persentase	23,41	Persentase	22,15	

Tabel 2.4.
Pencapaian Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator SPM PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	Orang	12	Orang	0	Capaian 0 orang tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan periode pelaporan tidak terdapat warga negara yang memerlukan pelayanan akibat penegakan Perda dan Perkada. Kondisi ini merupakan gambaran positif karena menunjukkan tidak adanya warga yang terdampak atau memerlukan pelayanan sebagai akibat dari penegakan Perda dan Perkada.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 Permasalahan dan Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Permasalahan Daerah dan Isu Srategis

PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	2
1) Belum Optimalnya	1) Penurunan tingkat kemiskinan

PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	2
Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing 2) Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Berkelanjutan 3) Belum Optimalnya Kualitas SDM dan Pembangunan Berbasis Gender 4) Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas 5) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 6) Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan dan Norma Masyarakat 7) Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Persampahan	dan pengurangan kesenjangan sosial; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing; 3) Penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan; 4) Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan yang tangguh dan berwawasan lingkungan; 5) Pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim; 6) Serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan daerah dan Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 secara keseluruhan masuk ke dalam permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, karena semuanya berkaitan dengan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Mempunyai Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai landasan pembangunan. Berbagai permasalahan daerah seperti belum optimalnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing, kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, hingga pengelolaan lingkungan hidup memerlukan dukungan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berperan dalam mendukung isu strategis penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial melalui penciptaan kondisi sosial masyarakat yang aman dan tertib, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik. Selain itu, program ini juga mendukung penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program ketenteraman dan ketertiban umum turut menciptakan lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat dalam mengakses

pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Upaya pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta pengendalian potensi konflik sosial menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.

Selanjutnya, terhadap isu peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan yang tangguh dan berwawasan lingkungan, Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki peran dalam pengawasan pemanfaatan ruang publik, penertiban pelanggaran perda, pengendalian gangguan terhadap fasilitas umum, serta mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang tertib dan nyaman. Program ini juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, program ini mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum, stabilitas daerah dapat terjaga sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara optimal.

Dengan demikian, Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian isu-isu strategis pembangunan daerah Kota Batam Tahun 2026 melalui terciptanya stabilitas sosial, kepastian hukum, dan ketahanan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis Operasional di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, dan Bidang Perlindungan Masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat, sudah diterapkan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 25 yaitu Pembinaan tekhnis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf c dilakukan oleh kepala daerah, kepala satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan pelindungan masyarakat, diantaranya pembinaan etika profesi, koordinasi Satpol PP, Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan melalui diklatsar, PPNS, Diklat Intelijen.
- 4) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.
Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan setiap triwulan dalam aplikasi E-SPM, SPIP, Semenanjung, SIPD.RI.
- 5) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Efektivitas penegakan seringkali menjadi sorotan, tantangannya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, resistensi terhadap penertiban, potensi konflik sosial, dan keterbatasan sumber daya Satpol PP. Pentingnya Penegakan Perda dan Perkada adalah fungsi utama Satpol PP dalam menciptakan

- ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan kewibawaan pemerintah daerah.
- 6) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Menjaga ketertiban di ruang public dan melaksanakan deteksi dini, mengatasi pedagang kaki lima (PKL) ilegal, gelandangan dan pengemis (PMKS), Wanita Tuna susila (WTS) serta gangguan ketertiban lainnya seringkali menimbulkan gesekan dan memerlukan pendekatan yang humanis namun tegas. Kondisi tertib dan tenteram adalah prasyarat bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang kondusif.
 - 7) Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Peran Satpol PP dalam membantu penanganan bencana, evakuasi, dan pengamanan kegiatan masyarakat seringkali kurang optimal atau kurang terkoordinasi dengan instansi lain. Satpol PP memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam berbagai situasi, namun untuk di Kota Batam saat ini belum adanya Satlinmas yang membantu dilingkungan Masyarakat terkait anggaran dalam pengukuhan Satlinmas di Kota Batam.
 - 8) Pelayanan yang Humanis dan Profesional
Citra Satpol PP terkadang dinilai kurang humanis atau bahkan represif di lapangan, peningkatan profesionalisme, pemahaman hak asasi manusia, dan kemampuan komunikasi yang baik menjadi krusial. Maka dengan itu Pelayanan yang humanis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Satpol PP.
 - 9) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Lain
Kurangnya koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, Dinas Vertikal dan instansi terkait lainnya dapat menghambat efektivitas penegakan dan pelayanan. Sinergi yang baik akan memperkuat pelaksanaan tugas dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
 - 10) Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kurangnya pelatihan yang memadai, dan rendahnya kesejahteraan anggota dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP. Personel yang kompeten, profesional, dan memiliki motivasi tinggi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.
 - 11) Sarana dan Prasarana
Keterbatasan atau kondisi sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai, peralatan penertiban, dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kelancaran operasional Satpol PP.
 - 12) Transparansi dan Akuntabilitas
Potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam tindakan penertiban dapat menurunkan kepercayaan publik, serta banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta transparansi dan akuntabilitas akan memastikan tindakan Satpol PP dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang Terkait dengan Isu Pelayanan Satpol PP adalah :

- 1) Regulasi dan Kebijakan
Kejelasan dan konsistensi Perda dan Perkada, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan Kepala Daerah sangat mempengaruhi efektivitas Satpol PP.
- 2) Anggaran
Ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional, pelatihan, dan pengadaan sarana prasarana menjadi faktor krusial.
- 3) Kepemimpinan

Visi dan komitmen pimpinan Satpol PP serta dukungan dari kepala daerah sangat menentukan arah dan kualitas pelayanan.

4) Kultur Organisasi

Budaya kerja, disiplin, dan etos kerja anggota Satpol PP mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

5) Partisipasi Masyarakat

Dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perda Perkada sangat membantu tugas Satpol PP.

6) Pengawasan

Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas Satpol PP dalam menjalankan Tupoksinya.

7) Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan, pelaporan, dan koordinasi saat turun lapangan dengan instansi terkait atau pun Masyarakat.

8) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran Ketenteraman ketertiban umum serta Pelanggaran Perda dan Perkada di kota Batam

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan Program Kegiatan Satpol PP Kota Batam memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam, tetapi keterkaitannya bersifat dukungan/kontribusi, karena sebagian besar permasalahan dan isu strategis merupakan isu pembangunan daerah lintas perangkat daerah. Satpol PP berkontribusi terutama melalui urusan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada, serta perlindungan masyarakat. Tugas Satpol PP sendiri mencakup penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mempunyai target 2 Dokumen dengan Anggaran Rp. 4.089.000 Berkurang menjadi Rp. 2.021.200
 - 2) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mempunyai target 3 Dokumen dengan anggaran Rp. 5.866.800 Berkurang menjadi Rp. 3.023.400.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula mempunyai target 598 berkurang menjadi 587, dengan anggaran Rp. 77.640.944.174 berkurang menjadi Rp. 69.929.411.747, Perubahan target dan anggaran dilakukan dalam rangka menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai dengan kondisi riil dan perkembangan data kepegawaian pada tahun berjalan. Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan mengalami penyesuaian dari semula 598 orang/bulan menjadi 587 orang/bulan, sehingga terjadi penyesuaian kebutuhan anggaran.
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang mempunyai target 12 Dokumen dengan anggaran Rp. 67.440.000 Bertambah Menjadi Rp. 58.101.600
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang mempunyai target 12 Dokumen dengan anggaran Rp. 8.405.000 bertambah menjadi Rp 8.436.800
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mempunyai target 5 orang dengan anggaran Rp. 49.870.000 bertambah menjadi Rp. 50.150.000. Perubahan target dan anggaran dilakukan dalam rangka menyesuaikan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur dengan kebutuhan organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai target 7 Paket dengan anggaran Rp, 187.711.500 berkurang menjadi Rp. 177.211.500

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai target 3 Paket dengan anggaran Rp.87.031.100 bertambah menjadi Rp.90.237.100
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 2 Paket, dengan anggaran awal Rp.46.085.600 bertambah menjadi Rp.58.882.800. Perubahan anggaran dilakukan dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target awal 12 Dokumen menjadi 2 Dokumen, dengan anggaran Rp. 1.970.400 bertambah menjadi Rp. 2.352.000
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Target 12 Laporan dengan pagu anggaran Rp.86.139.000 berkurang menjadi Rp.85.889.000.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target awal 0 Unit berubah menjadi 1 unit dengan pagu anggaran 0 Rupiah bertambah menjadi Rp. 500.000.000. Penambahan target dan anggaran dilakukan karena adanya kebutuhan kendaraan dinas operasional untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
 - 2) Sub Kegiatan Mebel target awal 47 unit menjadi 46 , dengan pagu anggaran Rp.478.052.200 bertambah menjadi Rp.497.138.400. Perubahan target dan anggaran dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran kebutuhan mebel untuk sarana kerja pegawai dan fasilitas perkantoran, disesuaikan dengan kebutuhan riil ruangan dan pegawai secara optimal.
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target awal 70 unit, dengan pagu anggaran Rp.383.565.408 berkurang menjadi Rp.374.984.808
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dengan target 1 Unit menjadi 2 unit, dengan Anggaran Rp.183.875.600 bertambah Menjadi 462.976.599. Penambahan target dan anggaran dilakukan untuk kebutuhan fasilitas pendukung yang belum terakomodasi dalam perencanaan awal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perkantoran.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target awal 12 Laporan, dengan pagu anggaran Rp.212.470.000 berkurang menjadi Rp.211.791.600
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 12 Laporan, dengan pagu anggaran Rp.169.360.464 bertambah menjadi Rp.170.702.064.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 1 unit, dengan pagu anggaran Rp.41.380.000 bertambah menjadi Rp.45.140.000
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target awal 11 unit berubah menjadi 11 Unit, dengan pagu anggaran Rp.161.210.000 Bertambah menjadi Rp. 175.910.000. Penambahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan, serta peningkatan biaya pemeliharaan kendaraan berdasarkan kondisi riil kendaraan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target awal 50 unit, dengan pagu anggaran Rp. 35.900.000 Bertambah menjadi Rp. 36.150.000
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target awal 4 unit berubah menjadi 5 Unit, dengan pagu anggaran Rp.668.424.000 bertambah menjadi Rp.960.450.999. Penambahan target dan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi bangunan yang berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota target awal 12 Dokumen Dokumen menjadi 5 Dokumen, dengan pagu anggaran Rp. 3.264.600 Berkurang menjadi Rp. 2.254.500
 - 2) Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum target awal 12 Dokumen berubah menjadi 5 Dokumen, dengan pagu anggaran Rp. 89.002.000 berkurang menjadi Rp.79.593.350
 - 3) Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum target awal 12 Dokumen berubah menjadi 4 Dokumen, dengan pagu anggaran 1.875.000 bertambah menjadi Rp.13.933.800. Adanya sinkronisasi dengan kebijakan atau arahan terbaru dari Pemerintah Pusat/Daerah.
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional target awal 23 Orang berubah menjadi 44 Orang, dengan pagu anggaran Rp. 198.202.000 bertambah menjadi Rp.268.515.000. Menyesuaikan dengan hasil analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) terbaru yang mewajibkan penambahan kuota bersertifikat demi memperkuat aspek penegakan perda di lapangan.
 - 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat target awal 100 Orang, dengan pagu anggaran Rp. 49.770.200 bertambah menjadi Rp. 50.330.000
 - 6) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan

- Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan target awal 12 Laporan, dengan pagu anggaran Rp. 79.260.000 bertambah menjadi Rp.79.641.600
- 7) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa target awal 12 Laporan, dengan pagu anggaran 1.074.000.000 bertambah menjadi Rp. 1.744.731.600. Terjadi perubahan Penertiban dan unjuk rasa yang memerlukan durasi penanganan lebih lama, jumlah personel pengamanan lebih besar, serta koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif demi menjaga kondusivitas wilayah.
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target awal 12 Laporan berubah menjadi 6 Laporan, dengan pagu anggaran 25.000.000 berkurang menjadi Rp.24.190.800
 - 9) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum target awal 615 unit menjadi 607 Unit, dengan pagu anggaran Rp. 5.475.273.901 berkurang menjadi Rp.2.526.092.400. Adanya Pergeseran dan pengalihan Skala Prioritas dan Rasionalisasi Anggaran Daerah dan kebijakan.
 - 10) Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota target awal 12 menjadi 1 Dokumen dengan pagu anggaran Rp. 46.728.600 berkurang menjadi Rp. 37.089.800. Perubahan ini dilakukan demi efisiensi birokrasi.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dengan target 12 Dokumen menjadi 1 Dokumen, dengan anggaran Rp. 12.351.000 berkurang menjadi Rp. 11.850.800. Dilakukan konsolidasi dan kodifikasi dokumen SOP.
 - 2) Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran dengan target 12 Laporan menjadi 6 laporan, dengan Anggaran Rp. 7.920.000 bertambah menjadi Rp. 8.470.800. Perubahan fokus pada kualitas dan kedalaman materi penyelidikan (kasus skala besar/berdampak luas) daripada kuantitas kasus ringan.
 - 3) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran dengan target 12 Laporan menjadi 6 Laporan, dengan anggaran Rp. 52.200.000 berkurang Menjadi Rp.45.010.800. Menyesuaikan dengan penurunan target output penyelidikan dan efisiensi pelaksanaan penegakan hukum yustisial. Anggaran berkurang seiring dengan berkurangnya frekuensi fasilitasi sidang tipiring di lapangan, setiap proses persidangan berjalan sesuai standar hukum yang berlaku.
 - 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target awal 12 Laporan Laporan, dengan pagu anggaran Rp. 16.113.000 bertambah menjadi Rp. 19.402.800. Adanya perluasan jangkauan wilayah sosialisasi dan diversifikasi media informasi. Penambahan pagu anggaran digunakan untuk mendukung efektivitas penyampaian informasi

- kepada masyarakat luas, termasuk penyediaan materi publikasi cetak/digital yang lebih interaktif dan penambahan titik lokasi sosialisasi tatap muka.
- 5) Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target awal 12 Laporan menjadi 6 Laporan, dengan pagu anggaran Rp. 23.880.000 berkurang menjadi Rp.23.290.800
 - 6) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target awal 12 Laporan, dengan pagu anggaran Rp. 87.160.000 bertambah menjadi Rp. 87.181.600.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan target 3 Dokumen dengan anggaran Rp. 2.551.500 bertambah Menjadi Rp. 2.616.000
 - 2) Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan target awal 12 Laporan menjadi 0 Laporan, dengan anggaran Rp. 66.384.000 Menjadi Rp. 0. Adanya kebijakan kuota diklat teknis dari Pemerintah Pusat, alokasi kepesertaan diklat pembentukan PPNS dibatasi secara ketat hanya untuk unsur pimpinan (Kepala Satuan) dan jumlah PPNS hanya 3 orang.
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan target awal 12 Laporan dengan pagu anggaran Rp. 44.534.500 bertambah Menjadi Rp.44.916.100
 - 4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS target awal 12 Laporan berubah menjadi 3 Laporan, dengan pagu anggaran Rp. 30.198.000 bertambah menjadi Rp. 45.560.400. Penyesuaian target output menjadi 3 laporan didasarkan pada realisasi kuota. Adapun kenaikan pagu anggaran disebabkan oleh penyesuaian biaya kontribusi diklat resmi terpusat, serta komponen akomodasi dan transportasi luar daerah bagi peserta yang diberangkatkan."

Adanya perbedaan target dan anggaran antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan bagian dari proses penyesuaian dan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat dinamis. Perbedaan tersebut terjadi sebagai akibat adanya kebijakan, prioritas pembangunan, serta arahan terbaru dari pemerintah yang perlu diakomodasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan dan prioritas daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kondisi aktual di lapangan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja. Sementara itu, penyesuaian anggaran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, standar biaya yang berlaku, serta hasil sinkronisasi antara target kinerja dan kebutuhan pendanaan.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2026, target dan anggaran yang sebelumnya tercantum dalam RKPD dapat mengalami penajaman, penyesuaian, maupun perubahan berdasarkan hasil pembahasan dan arahan terbaru. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan lebih realistis, efektif, efisien, terukur, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan target dan anggaran antara RKPD dan Renja bukan merupakan ketidaksesuaian dalam proses perencanaan, tetapi merupakan bentuk adaptasi dan penyelarasan terhadap perkembangan kebijakan dan arahan terbaru. Penyesuaian tersebut tetap dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip konsistensi, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keterukuran kinerja.

Selanjutnya, target dan anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renja menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja, kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan riil penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam. Oleh karena itu, perubahan target dan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					88.013.485.047	79,062,559,467	-8.950.925.580	
1.05	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum					88.013.485.047	79,062,559,467	-8.950.925.580	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	74.70	74.70	80.557.069.746	73.894.864.567	-6.662.205.179	
			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	89	89				
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%	9.955.800	5.044.600	-4.911.200	
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.089.000	2.021.200	-2.067.800	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.866.800	3.023.400	-2.843.400	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	77.708.384.174	69.929.411.997	-7.778.972.177	
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	598 Orang/Bulan	587 Orang/Bulan	77.640.944.174	69.871.310.397	-7.769.632.777	
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	67.440.000	58.101.600	-9.338.400	
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	100%	100%	8.405.000	7.741.800	-663.200	
1.05.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang	Sub Kegiatan Pengamanan Barang	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	8.405.000	7.741.800	-663.200	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
1.05.01.2.05	Keiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	3.82%	88.37%	49.870.000	65.955.000	16.085.000	
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	5 Orang	4 Orang	49.870.000	65.955.000	16.085.000	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	446.217.100	448.851.900	2.634.800	
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.119.200	8.119.200	0	
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	187.711.500	177.211.500	-10.500.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.160.300	29.160.300	0	
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	87.031.100	90.237.100	3.206.000	
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	46.085.600	63.282.600	17.197.000	
1.05.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 Dokumen	1.970.400	2.352.000	381.600	
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8 Laporan	86.139.000	82.889.000	-3.250.000	
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	1.045.493.208	1.835.099.807	789.606.599	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 Unit	1 Unit	0	500.000.000	500.000.000	
1.05.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Mebel	Sub Kegiatan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	47 Unit	72 Unit	478.052.200	497.138.400	19.086.200	
1.05.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	383.565.408	374.984.808	-8.580.600	
1.05.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	183.875.600	462.976.599	279.100.999	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	381.830.464	382.518.664	688.200	
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	212.470.000	211.816.600	-653.400	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Disediakan	Disediakan						
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	169.360.464	170.702.064	1.341.600	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	906.914.000	1.215.840.999	308.926.999	
1.05.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.380.000	45.140.000	3.760.000	
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	161.210.000	176.290.000	15.080.000	
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	50 Unit	51 Unit	35.900.000	36.150.000	250.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	Lainnya yang Dipelihara						
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	668.424.000	958.260.999	289.836.999	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100%	100%	7.456.415.301	5.167.694.900	-2.288.720.401	
			Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang telah mengikuti Diklar Dasar	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang telah mengikuti Diklar Dasar	23.41%	23.41%				
			Persentase Perda Perkada yang di tegakan	Persentase Perda Perkada yang di tegakan	100%	100%				
			Persentase Penyelenggaraan Satlinmas	Persentase Penyelenggaraan Satlinmas	31.82%	31.82%				
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	100%	100%	7.042.376.301	4.819.394.600	-2.222.981.701	
			Persentase	Persentase	31.82%	31.82%				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas						
			Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	23.41%	23.41%				
			Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%				
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	12 Dokumen	5 Dokumen	3.264.600	2.254.500	-1.010.100	
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12 Dokumen	5 Dokumen	89.002.000	79.484.600	-9.517.400	
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	4 Dokumen	1.875.000	13.933.800	12.058.800	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah aparatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	Jumlah aparatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	23 Orang	44 Orang	198.202.000	272.805.000	74.603.000	
1.05.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	49.770.200	46.476.900	3.293.300	
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Keternteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawasan	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Keternteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	79.260.000	79.641.600	381.600	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	1.074.000.000	1.744.731.600	670.731.600	
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	6 Laporan	25.000.000	24.190.800	-809.200	
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	615 Unit	607 Unit	5.475.273.901	2.526.092.400,	-2.949.181.501	
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	12 Dokumen	1 Dokumen	46.728.600	29.783.400	-16.945.200	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran	Persentase Capaian Strategi	100%	100%	270.371.000	265.954.600	-4.416.400	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	dalam Penegakan Perda Perkada						
1.05.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Dokumen	1 Dokumen	12.351.000	11.850.800	-500.200	
1.05.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	12 Unit	11 Unit	70.747.000	70.747.000,	0	
1.05.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	6 Laporan	7.920.000	8.470.800	550.800	
1.05.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Laporan	6 Laporan	52.200.000	45.010.800	-7.189.200	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah								
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	16.113.000	19.402.800	3.289.800	
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 Laporan	6 Laporan	23.880.000	23.290.800	-589.200	
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	87.160.000	87.181.600	21.600	
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai	Rasio PPNS Satpol PP	Rasio PPNS Satpol PP	7.14%	7.14%	143.668.000	82.345.700	-61.322.300	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
1.05.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.551.500	2.616.000	64.500	
1.05.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	12 Laporan	0 Laporan	66.384.000	0	-66.384.000	
1.05.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	12 Laporan	44.534.500	44.916.100	381.600	
1.05.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	3 Laporan	30.198.000	34.813.600	-4.615.600	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 -2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan,

sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

